



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA GRESIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI HAUROH ZUBAIDAH, SHI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 658063

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	285.718.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m ² /42 m ² di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 95.718.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m ² /95 m ² di LUMAJANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m ² /109 m ² di LUMAJANG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	190.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ALL NEW ERTIGA GX ALL NEW ERTIGA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
3. MOTOR, HONDA SPM SOLO SUPRA 125 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.878.267
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	479.596.267
III. HUTANG	Rp.	391.154.012
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	88.442.255

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 September 2019**
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.